

Reorientasi Pendidikan Islam di Indonesia

**Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Filsafat:
Antara Cita dan Fakta**
Mohamad Arif Majid

**Membangun Epistemologi Pendidikan Islam
Melalui Kepemimpinan Spiritual:
Suatu Telaah Diskursif**
Ahmad Fauzi

**Nilai-Nilai Akhlak dalam *Suluk Linglung* dan
Relevansinya dengan Pendidikan Islam**
M. Syamsul Ma'arif

**Teori Generatif-Transformatif Noam Chomsky dan
Relevansinya dalam
Pembelajaran Bahasa Arab**
Bagus Andrian Permata

**Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Multikultural di
Madrasah**
Ahmad Rifa'i

**Studi Komparatif Antara Teori Belajar dalam
Perspektif Barat dan Islam**
Addin Arsyadana

**Implementasi Pendidikan Inklusi di Kota Kediri:
Studi Kasus di SMP YBPK Kediri**
Ninik Zuroidah dan Fathimatul Zahrol F

**Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis IQ,
SQ dan EQ**
Atik Wartini

**Transformasi Manajemen Pendidikan Pesantren
Salafiyah di Jawa Timur:
Studi Kualitatif di Pesantren Lirboyo Kediri**
Mochamad Arif Faizin

**Mencari Format Model Organisasi Yang Tepat Untuk
Pesantren**
Ima Fitriyah dan Muhammad Fathurrahman

**Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia:
Kajian Deskripsi-Analitik Model Lembaga Pendidikan
Islam**
Binti Maunah

**Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren:
Studi Kasus di SMP Puncak Darus Salam Pamekasan**
Fauzan

**Membangun Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan:
Proses Membangun Nilai dalam Budaya Organisasi
Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan**
Chusnul Chotimah

**Academic Writing Experience and Students'
Perception of Teacher Feedback:
A Study at The Center for Religious and Cross-Cultural
Studies (CRCS) Gadjah Mada University**
Niswatin Faoziah

Empirisma	Vol. 24	No. 2	Hal. 143 - 306	Kediri Juli 2015	ISSN 1829-9563
-----------	---------	-------	-------------------	---------------------	-------------------

Empirisma

Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam

Vol. 24 No. 2 Juli 2015

ISSN 1829-9563

EMPIRISMA adalah Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri. Jurnal ini adalah media diseminasi dan dialog akademik bagi para dosen dan peneliti yang memiliki keterkaitan di bidang kajian pemikiran dan kebudayaan Islam. Jurnal ini diterbitkan secara berkala setiap enam bulan sekali pada bulan Januari dan Juli.

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab	: Nur Chamid
Pemimpin Redaksi	: Wahidul Anam
Wakil Pemimpin Redaksi	: Moh. Rois
Sekretaris Redaksi	: Ali Samsuri
Redaktur Pelaksana	: Mukhamad Abdullah Muhammad Yasin M. Mu'tashim Billah Toyyibah Maufur Zuhri Humaidi
Desain Grafis	: Ilham Masyhuri Sri Wahyuni A. Dian Lukman Harum Sukron Abadan
Sekretariat	: Marhasan Lahuri Dion Ekha Sanjaya Achmad Syafiqul Kholan Fitri Wijayanti

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Kantor P3M STAIN Kediri
Jln. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri Telp. (0354) 689282 Fax. (0354) 689282
Email: journalempirisma@gmail.com
Website: <http://stainkediri.ac.id>

Redaksi menerima naskah ilmiah hasil penelitian dalam bidang pemikiran dan kebudayaan Islam. Naskah dikirim ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Kediri pada jam kerja (07.30-04.00 WIB) dalam bentuk *print-out* dan *soft-copy* diketika dalam Microsoft Word, Time New Roman 12 pt, spasi ganda pada kertas ukuran kwarto (A4) dengan panjang tulisan 20-25 hlm.

Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Filsafat: Antara Cita dan Fakta

Mohamad Arif Majid

**Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual:
Suatu Telaah Diskursif**

Ahmad Fauzi

Nilai-nilai Akhlak dalam *Suluk Linglung* dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam

M. Syamsul Ma'arif

**Teori Generatif-Transformatif Noam Chomsky dan Relevansinya dalam
Pembelajaran Bahasa Arab**

Bagus Andrian Permata

Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Multikultural di Madrasah

Ahmad Rifa'i

Studi Komparatif Antara Teori Belajar dalam Perspektif Barat dan Islam

Addin Arsyadana

Implementasi Pendidikan Inklusi di Kota Kediri: Studi Kasus di SMP YBPK Kediri

Ninik Zuroidah dan Fathimatul Zahrol F

Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis IQ, SQ dan EQ

Atik Wartini

**Transformasi Manajemen Pendidikan Pesantren Salafiyah di Jawa Timur:
Studi Kualitatif di Pesantren Lirboyong Kediri**

Mochamad Arif Faizin

Mencari Format Model Organisasi Yang Tepat Untuk Pesantren

Ima Fitriyah dan Muhammad Fathurrahman

Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia:

Kajian Deskripsi-Analitik Model Lembaga Pendidikan Islam

Binti Maunah

Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren:

Studi Kasus di SMP Puncak Darus Salam Pamekasan

Fauzan

**Membangun Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan:
Proses Membangun Nilai dalam Budaya Organisasi Untuk
Pengembangan Lembaga Pendidikan**
Chusnul Chotimah

**Academic Writing Experience and Students' Perception of Teacher Feedback:
A Study at The Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS)
Gadjah Mada University**
Niswatin Faoziah

Kita semua maklum bahwa pendidikan memegang peran sentral dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan berperan membentuk karakter seseorang baik sebagai pribadi maupun warga negara. Dalam konteks yang lebih luas, karakter sebuah bangsa juga ditentukan oleh praktik pendidikan yang dijalankannya. Maka dari itu, tidak heran bila kebijakan pendidikan dalam sebuah bangsa selalu menjadi *central issue* di kalangan pemangku kebijakan, tak terkecuali di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, pendidikan Islam memiliki peran sangat strategis mengingat mayoritas penduduk di negara ini adalah Muslim. Ragam model pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun informal, tetap memiliki magnet tersendiri bagi Muslim. Bahkan, sejarah bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan Islam semisal pesantren. Seiring perkembangan zaman, berbagai upaya telah dilakukan untuk tetap mempertahankan dan memajukan eksistensi pendidikan Islam karena tuntutan perubahan yang tak terhindarkan. Di sinilah kemudian pendidikan Islam, dengan berbagai model institusi penyelenggaranya, menghadapi tantangan serius baik dari sisi manajemen maupun karakter pendidikan yang diajarkan kepada anak didik. Orientasi pendidikan Islam tidak bisa tidak juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman jika ingin ditinggalkan.

Inilah pula mengapa Empirisma edisi kali mengangkat topik besar terkait “Reorientasi Pendidikan Islam di Indonesia”. Edisi kali ini membahas pendidikan Islam dari berbagai aspek, diawali dari pembahasan konsep, manajemen, hingga implementasinya dalam tataran praktik. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para kontributor, dan juga mitra bebestari edisi kali ini: Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag (UIN Sunan Ampel Surabaya); Dr. Hj. Mufidah, M.Ag (UIN Malang); Dr. Hj. Munifah M.Ag (STAIN Kediri); Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag (STAIN Kediri); dan Dr. Imam Machalli, M.Pd. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Selamat Membaca!

Tim Redaksi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model *Library of Congress* untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

Arab		Indonesia	Arab		Indonesia	Arab		Indonesia
ا	=	'	ر	=	r	غ	=	gh
ب	=	b	ز	=	z	ف	=	f
ت	=	t	س	=	s	ق	=	q
ث	=	th	ش	=	sh	ك	=	k
ج	=	j	ص	=	ṣ	ل	=	l
ح	=	ḥ	ض	=	ḍ	م	=	m
خ	=	kh	ط	=	ṭ	ن	=	n
د	=	d	ظ	=	ẓ	و	=	w
ذ	=	dh	ع	=	‘	هـ	=	h
	=			=		ي	=	y

Bunyi *madd*: ā (آ)
ī (إِي)
ū (أُو)

Bunyi *dipotong*: ay (أَي)
aw (أَوْ)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pedoman Transliterasi.....	iv
Daftar Isi	v-vi
Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Filsafat: Antara Cita dan Fakta	
<i>Mohamad Arif Majid</i>	143-154
Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual: Suatu Telaah Diskursif	
<i>Ahmad Fauzi</i>	155-167
Nilai-Nilai Akhlak dalam <i>Suluk Linglung</i> dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam	
<i>M. Syamsul Ma'arif</i>	168-178
Teori Generatif-Transformatif Noam Chomsky dan Relevansinya dalam Pembelajaran Bahasa Arab	
<i>Bagus Andrian Permata</i>	179-187
Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Multikultural di Madrasah	
<i>Ahmad Rifa'i</i>	188-198
Studi Komparatif Antara Teori Belajar dalam Perspektif Barat dan Islam	
<i>Addin Arsyadana</i>	199-213
Implementasi Pendidikan Inklusi di Kota Kediri: Studi Kasus di SMP YBPK Kediri	
<i>Ninik Zuroidah dan Fathimatul Zahrol F</i>	214-226
Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis IQ, SQ dan EQ	
<i>Atik Wartini</i>	227-236
Transformasi Manajemen Pendidikan Pesantren Salafiyah di Jawa Timur: Studi Kualitatif di Pesantren Lirboyo Kediri	
<i>Mochamad Arif Faizin</i>	237-254
Mencari Format Model Organisasi Yang Tepat Untuk Pesantren	
<i>Ima Fitriyah dan Muhammad Fathurrahman</i>	255-263

Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia: Kajian Deskripsi-Analitik Model Lembaga Pendidikan Islam <i>Binti Maunah</i>	264-274
Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren: Studi Kasus di SMP Puncak Darus Salam Pamekasan <i>Fauzan</i>	275-284
Membangun Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan: Proses Membangun Nilai dalam Budaya Organisasi Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan <i>Chusnul Chotimah</i>	285-296
Academic Writing Experience and Students' Perception of Teacher Feedback: A Study at The Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Gadjah Mada University <i>Niswatin Faoziah</i>	297-306

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN DESKRIPSI-ANALITIK MODEL LEMBAGA PENDIDILAN ISLAM

Binti Maunah*
uun.lilanur@gmail.com

Abstract

Islamic educational institutions, in general, play a significant role in the world of education. Through a learning process, these institutions should be able to bring students towards national education goals and become a mirror for other educational institutions. This article attempts to examine Islamic educational intuitions, both formal and informal, in Indonesia focusing on their models. The discussion centers on two largest models of Islamic educations institutions in Indonesia, which pesantren (non-formal) and madrasah (formal). It is true that diversification of Islamic educational institutions supported with clear objectives and focused on professional differentiation is a good, effective, and efficient way of education. Nevertheless, this article argues that such diversification will only lead to duplications, uselessness and ineffectiveness if the term means only pseudo-diversification with outer and artificial purposes.

Keywords: Lembaga Pendidikan Islam, Pesantren, Madrasah

Pendahuluan

Wacana pembangunan yang senantiasa dijalankan di atas paradigma modern selalu mengedepankan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan modern kontemporer semakin instrumental dan materialistis di mana denyut kehidupan politik secara dominan ditentukan oleh gerak kapital. Akibatnya, proses ekonomisasi dan industrialisasi-pragmatisasi berjalan secara efektif dan efisien.

Hal ini merupakan karakteristik khusus di mana berbagai pandangan yang menyoroti tren abad ke-21 setidaknya diwarnai oleh empat karakter. Di antara karakter itu adalah interdependensi sosial-ekonomi, semakin kerasnya kompetisi antar bangsa, makin sulitnya negara berkembang beralih status ke negara maju dan semakin nyatanya kemunculan masyarakat hiperindustrial (yaitu, masyarakat yang memiliki otonomi dan mobilitas tinggi serta sarat informasi) dalam ranah politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹

Menurut Piotr Sztompka, gambaran situasi (profil) kehidupan modern adalah suatu sistem kompleks dari *business science technology*.² Konsep kemajuan adalah transformasi yang diarahkan pada satu versi paham perkembangan (*developmentalism*). Menilik situasi di atas, pertanyaan tertuju pada bagaimana kita mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. Peningkatan SDM, sebagai upaya optimalisasi potensi diri manusia, dalam pengertiannya yang mendasar adalah persoalan *survival* dimensi nilai yang esensial. Dimensi nilai ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah prinsip yang jelas dan substansial, sesuai dengan maksud dan tujuan dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN dan UU No. 11 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam rangka membangun, membina dan mengembangkan SDM yang dijalankan secara terstruktur, sistematis dan terprogram serta berkelanjutan. A. Tirto Sudiro mengatakan bahwa setiap dinamika dan tuntutan yang berkembang di masyarakat harus pula

*Dosen IAIN Tulungagung

¹Dawam Rahardjo (ed.), *Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia Abad XXI*, (Jakarta: PT. Inter Masa, 1997), xv.

²Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Ali Mandan, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm. 27.

diiringi dengan dinamika pendidikan. Alasannya, perkembangan tersebut selalu disertai dengan berbagai perubahan kualitatif maupun kuantitatif, baik normatif maupun administratif.³

Dalam rumusan seminar nasional tentang "Pemantapan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia" di UNMER Malang dikatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional (SPN) kita dirasa belum relevan dengan kebutuhan pembangunan. Lantas, bagaimana dengan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang ada sekarang ini?⁴

Untuk itu, perencanaan SPN perlu diproyeksikan jauh ke depan dengan pendekatan multidimensional, khususnya dalam menghadapi arus modernisasi yang dewasa ini berjalan menurut paradigma probabilitistik-relatifistik yang pada akhirnya menggerus dan memarginalkan nilai-nilai religiusitas (*humaniora*). Di samping itu, diperlukan upaya terencana, sistematis dan konsisten dalam membangun SDM. Maka dalam hal ini perlu ditekankan bagaimana membangun SPN yang tangguh agar orang Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pengemban budaya (*culture dredger*), melainkan menjadi pengelola budaya. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengisolasi diri dari perkembangan neokolonialisme sebagai manifestasi imperialisme ekonomi kapitalis.

Menurut Munir Mulkhan, persoalan pokok yang dihadapi dalam era globalisasi saat ini adalah bagaimana menyiapkan SDM modern dan religius yang mampu bersaing dalam kehidupan yang diwarnai budaya IPTEK. Lembaga pendidikan mengemban tugas tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah apakah lembaga dan system pendidikan (khususnya Islam) saat ini masih akomodatif terhadap tantangan baru, ataukah kita harus berpikir alternatif tentang kedua hal tersebut di atas? Artikel ini berusaha menjawab

dua pertanyaan penting: (1) Bagaimana Implementasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia?; (2) dan Bagaimana Model Pendidikan Islam di Indonesia?. Penelitian ini berusaha mengetahui keanekaragaman Pendidikan Agama Islam di Indonesia dari sisi kejelasan dan keterarahan tujuan dan keefektifan dan efisiensi deferensiasi profesi.

Eksistensi Pendidikan Islam

Dalam perkembangannya, pendidikan Islam semakin dipertanyakan relevansinya dalam pembentukan budaya modern. Dalam hal ini pendidikan mengalami degradasi fungsional, karena semakin berorientasi materialis dan pendidikan cenderung sebagai aset sosial. Chalijah Hasan menambahkan bahwa dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, dewasa ini terjadi kesenjangan antara proses pembangunan yang berwatak materialistik-rasionalistik dan kehidupan agama yang mengandung dogma dan mempertahankan tradisi. Akibatnya, agama terkesan sangat tidak adaptif dan mempertahankan *status quo*.⁵

Uraian di atas menunjukkan betapa besar konflik yang dihadapi oleh dunia pendidikan (terutama pendidikan Islam). Pendidikan mengalami perubahan fungsi di tengah pergeseran identitas masyarakat menuju pola pikir rasional teknologis dan cenderung melepaskan diri dari tradisionalisme kultural-edukatif. Menurut Arifin, hal ini menunjukkan bahwa fungsi lembaga pendidikan kita harus *laten* dan *antisipatif* terhadap kecenderungan tersebut. Maka dari itu, lembaga pendidikan Islam yang masih konservatif dan statis dalam menyerap tendensi dan aspirasi masyarakat tradisional seperti sekarang perlu melakukan inovasi dalam wawasan, strategi dan program-program agar mampu menjawab secara aktual dan fungsional tantangan-tantangan baru.⁶ Sebagaimana dikatakan oleh Munir Mulkhan, pembentukan SDM modern dan religius

³Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan*, xvii.

⁴DEPLEMHANNAS dan UNMER, *Rumusan Hasil Seminar Nasional 'Pemantapan Sistem Pendidikan Nasional*, (Malang: UNMER Pers, 1990), hlm. 4.

⁵Chalijah Hasan, *Kajian Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 155.

⁶M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 8.

sangat bergantung pada dasar paradigma yang digunakan dalam melakukan rekonstruksi sistem pemikiran dan pendidikan Islam.⁷

Mengingat pendidikan dianggap sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab, maka muncul pertanyaan bagaimana sesungguhnya format pendidikan Indonesia (khususnya lembaga pendidikan Islam) baik dari basis filosofi maupun kerangka praksis. Pertanyaan ini juga berlaku bagi lembaga pendidikan Islam: Apakah model (bentuk) lembaga pendidikan Islam yang ada sekarang mampu menyesuaikan terhadap arus modernisasi, dan apakah setiap *out put*-nya memiliki kemampuan daya adaptabilitas yang tinggi terhadap lingkungan, sehingga mampu berperan dalam mengelola budaya (*cultur ontwikkelear*)?

Secara etimologis, ada kontroversi di kalangan tokoh pendidikan mengenai pengertian pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam pada dasarnya digali dari tiga perkara: "*tarbiyah, ta'lim dan ta'dib*". Definisi ini juga ditegaskan dalam rekomendasi konferensi internasional tentang pendidikan Islam pertama di Jeddah pada tahun 1997.⁸ Syekh Muhammad al-Nuqaib al-Attas, sebagaimana dikutip oleh Imam Bawani dan Isa Ansari, mendefinisikan pendidikan Islam dengan mempertentangkan "*tarbiyah, ta'lim dan ta'dib*".⁹

Perbedaan juga terjadi dalam definisi pendidikan Islam secara terminologis. Menurut Syahminan Zaini, sebagaimana dikutip oleh Imam Bawani dan Isa Ansari, pendidikan Islam adalah usaha pengembangan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud (tercapai) kehidupan manusia yang makmur dan bahagia.¹⁰ Ahmad D. Marimba mengartikan pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani dan ruhani dengan berdasarkan pada hukum-hukum Islam menuju pada terbentuknya kepribadian

utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹¹ Hasan Langgulung terlebih dahulu melihat pendidikan Islam dari sudut pandang individu, masyarakat dan individu masyarakat. Dari segi individu, pendidikan Islam merupakan proses pengembangan potensi, dari segi masyarakat berarti proses pewarisan budaya, dan dari segi individu masyarakat berarti proses interaksi antara potensi individu dengan budaya.

Chalidjah Hasan menambahkan bahwa pendidikan Islam adalah proses dan aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang dikehendaki.¹² Sebagaimana dikatakan Tadjab, pendidikan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka membimbing dan mempersiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas hidupnya.¹³ Pengertian ini senada dengan ungkapan Burlian Somad, sebagaimana dikutip oleh Djamiluddin dan Abdullah Aly, bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Allah.¹⁴

Perdebatan seputar pendidikan Islam juga pernah dibahas dalam seminar pendidikan Islam se-Indonesia pada tanggal 7 Nopember 1960 di Cipayung Bogor. Seminar ini merekomendasikan bahwa pendidikan Islam adalah membimbing, mengarahkan, mengajarkan, melatih dan mengawai berlakunya semua ajaran Islam. Karena pendidikan Islam juga adalah soal falsafah, dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktik pendidikan Islam harus didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis.¹⁵

Model Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam juga soal sosial, sehingga dalam kelembagaannya ia tidak bisa

⁷Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, (Yogyakarta: Sipress, 1994), hlm. 27.

⁸Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 17.

⁹Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 56.

¹⁰Imam Bawani, *Tradisionalisme*, hlm. 76.

¹¹Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1991), hlm. 77.

¹²Chalidjah Hasan, *Kajian Perbandingan*, hlm. 190.

¹³Tadjab, *Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Karya Abdi Tama, 1994), hlm. 58.

¹⁴Djamiluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 9.

¹⁵M. Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gema Insan Pers, 1996), hlm. 25.

dilepaskan dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga disebut juga dengan institusi atau pranata, sedangkan lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi dan terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.¹⁶ Dalam proses pembudayaan umat, keberadaan kelembagaan pendidikan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) dengan tugas dan tanggung jawab kultural-edukatif terhadap anak didik (masyarakat).

Dalam pokok bahasan ini, masih ada perdebatan tentang lembaga apa saja yang layak disebut sebagai lembaga pendidikan Islam. Menurut Hamdani Ali, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin dan Abdul Mujib, wujud lembaga pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Masjid (surau, langgar, musolla dan meunasah);
- b. Madrasah dan pondok pesantren (*kuttāb*);
- c. Pengajian dan penerangan Islam (majlis ta'lim);
- d. Kursus-kursus keislaman (training-training ke-Islam-an);
- e. Badan-badan pembinaan rohani (biro pernikahan, biro konsultasi keagamaan);
- f. Badan-badan konsultasi ke-Islam-an;
- g. *Musābaqah tilāwat al-Qur'ān*.¹⁷

Perkembangan kelembagaan pendidikan Islam, menurut Jusuf Amir Faisal, secara implisit menunjukkan adanya pergeseran aksentuasi dari perumusan pendidikan bersifat meruokratis.¹⁸

Penganekaragaman lembaga pendidikan Islam dengan tujuan yang jelas dan terarah pada deferensiasi profesi merupakan cara yang baik, efektif dan efisien. Akan tetapi penganekaragaman

(diversifikasi) semu dan nuansa tujuan atau suatu proses diversifikasi melalui bentuk lahirnya saja akan berdampak pada duplikasi, penghamburan dan ketidakefektifan. Hal ini senada dengan pendapat Muslih Usa bahwa ada dua model lembaga pendidikan Islam di Indonesia: *pesantren* sebagai lembaga pendidikan nonformal dan *madrasah* sebagai lembaga pendidikan formal.¹⁹ Tulisan ini hanya akan membatasi pada dua bentuk atau model saja sebagaimana pendapat Muslih Usa di atas.

Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia. Secara historis, menurut Abdul Hadi, mula-mula munculnya pesantren sejalan dengan proses Islamisasi di Jawa pada khususnya.²⁰ Pesantren merupakan institusi pendidikan yang melembaga dalam sub kultur masyarakat Indonesia. Pesantren tidak hanya mengandung unsur keaslian (indigenous) Indonesia, tetapi juga mengandung unsur makna keislaman, sebab lembaga serupa juga sudah ada pada masa kekuasaan Hindu-Budha, sedangkan Islam meneruskan dan mengislamkannya.²¹ Ahmad Tafsir mengungkapkan hal senada, bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang kemunculan dan perkembangannya diakui oleh masyarakat. Pesantren memiliki lima ciri dan komponen pokok, yaitu kyai, pondok (asrama), masjid, santri dan pengajian kitab kuning.²² Zamakhsyari Dhofier menyebutkan lima elemen pesantren: pondok, masjid, pengajian kitab-kitab Islam klasik (kuning), santri dan kyai.²³ Pesantren dengan karakteristik umum yang terdiri dari elemen tersebut di atas, menurut Serat Ciblek

¹⁶Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, (Bandung: Tri Genda Karya, 1993), hlm. 284.

¹⁷Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan*., hlm. 289.

¹⁸Jusuf Amir Faesal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995), hlm. 120.

¹⁹Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 1.

²⁰Abdul Hadi, *Sikap dan Tradisi Keilmuan Pesantren Dalam Religius IPTEK: Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 140.

²¹Mundzier Suparta, *Perubahan Orientasi Pondok Pesantren Salafiyah Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat*, (Jakarta: Asta Buana Sejahtera, 2009), hlm.1.

²²Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan*., hlm. 191.

²³Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Suatu Paradigma Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 44.

dan Serat Centani, diperkirakan telah ada sejak abad XVI.²⁴

Imam Bawani menambahkan bahwa, jika dilihat dari proses kemunculan dan kelahiran pesantren, urutan lima elemen tersebut adalah sebagai berikut: kyai, masjid, santri, pondok dan pengajaran kitab-kitab klasik. Kyai adalah cikal bakal berdirinya pesantren. Masjid sebagai tempat berjamaah, melakukan wirid dan doa-doa, i'tikaf, tadarus al-Qur'an dan sejenisnya, dan kadang digunakan untuk tempat menuntut ilmu keagamaan. Santri menunjuk pada kelompok penuntut ilmu yang biasa dibedakan dengan kalangan mereka yang disebut dengan murid madrasah dan siswa sekolah. Pribadi santri memiliki aspek-aspek religius yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. Di antaranya adalah aspek keyakinan (*the belief dimension*), peribadatan dan wirit dzikirnya (*religious practice, ritual and devotion*), pengalaman batin pengetahuan agama (*the knowledge dimension*) maupun konsekuensi-konsekuensi sebagai seorang Muslim (*the consequences dimension*). Dalam konteks ini, santri terdiri dari dua macam: *santri kalong* dan *santri mukim*.²⁵

Istilah *pondok*, menurut Sujoko Prasajo, sebagaimana dikutip oleh Manfred Ziemek, diambil dari bahasa Arab, *fundūq* yang artinya ruang tidur, wisma atau hotel sederhana. Secara umum, bangunan ini mengisolasi diri karena perlu konsentrasi dalam proses pembelajaran di kalangan santri.²⁶

Kitab klasik (kuning) pada awalnya adalah satu-satunya pengajaran yang diberikan di lingkungan pesantren. Dari kelima elemen tersebut, ciri pendidikan pesantren merupakan bentuk pendidikan yang berorientasi pada sebuah pelestarian budaya.

²⁴Abdurrahman Assegaf, *Kontribusi Lembaga Pendidikan Islam Abad XX Bagi Intelektual Islam di Indonesia*, (Surabaya: KANWIL DEPAG, 1995), hlm. 89.

²⁵Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 143.

²⁶Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1996), hlm. 91

Sebagai lembaga tertua, dalam sejarah perkembangannya pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non-klasikal, yaitu model (sistem) pendidikan dengan metode pengajaran *wetonan* dan *sorogan*, yang kalau di daerah Jawa Barat disebut dengan *bandongan* dan di Sumatera dikenal dengan *halaqah*.

Secara umum, sebagaimana disebut di atas oleh M. Arifin, pengertian definitif tentang pesantren sulit untuk dirumuskan karena tidak ada standar khusus dan patokan yang pasti dari sebuah pesantren. Maka dari itu, untuk memahaminya, kita perlu melihat latar belakang dengan berbagai aspek pesantren melalui pendekatan yang berorientasi pada kenyataan hidup (*living reality-oriented approach*), yang meliputi latar belakang historis sebuah pondok pesantren. Pesantren secara historis tumbuh di lingkungan masyarakat dan memiliki implikasi politis dan kultural seperti sikap *non-cooperative*. Karenanya, ada golongan santri, priyayi dan abangan yang berorientasi pada animisme dan dinamisme.²⁷

Pesantren memang telah menjadi fenomena pendidikan semenjak dahulu kala. Di dalam hal ini, maka keberadaan pesantren telah menjadi bagian penting di dalam proses pendidikan bangsa yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Pesantren di dalam khazanah sejarah bangsa Indonesia telah menjadi bagian penting di dalam proses Islamisasi nusantara. Tidak bisa dibayangkan bahwa tanpa kehadiran pesantren maka kaderisasi ulama dalam berbagai varian keilmuannya tidak akan dapat dipahami seperti sekarang. Pesantren sebagai pusat penciptaan kader ulama yang menjadi penyebar Islam di nusantara tentu merupakan bukti autentik tentang peran pesantren di dalam menyumbang Islamisasi Nusantara yang dimaksud.²⁸

Eksistensi pesantren menjadi ujung tonggak perjuangan bangsa. Peran pesantren menjadi berbeda di masa sekarang. Pesantren

²⁷M. Arifin, *Kapita Selekta.*, hlm. 241.

²⁸Nur Syam, *Dari Bilik Birokrasi: Esai Agama, Pendidikan, dan Birokrasi*, (Jakarta: PT Sejahtera Utama, 2014), hlm. 246-247.

masa kini lebih menekankan peranannya pada proses pengembangan pendidikan. Pendidikan yang diberikan meliputi pendidikan agama dan pendidikan umum sehingga menunjang kebutuhan masyarakat zaman sekarang dalam mengatasi globalisasi.

Menurut Abdurrahman Assegaf, sebagaimana disebutkan dalam *Mimbar Pembangunan Agama*, eksistensi pesantren juga berfungsi sebagai katalisator dan dinamisator bagi internalisasi nilai-nilai Islam di Indonesia. Hal ini tampak jelas karena pesantren merupakan wadah bagi terselenggaranya pendidikan Islam. Terlebih lagi, pesantren tidak hanya berkontribusi dalam aspek kultural-religius semata, tapi juga bagi perjuangan melawan kolonialisme sebelum Indonesia merdeka.²⁹

Madrasah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri, dan berwawasan kebangsaan; dengan proses penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip *good governance* dan pemberdayaan masyarakat agar sanggup menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia madrasah. Jumlah madrasah mengalami pertumbuhan rata-rata 4,7% setiap tahun, sedangkan jumlah siswa madrasah juga terus meningkat sebesar 3,6% setiap tahun.

Tabel 1. Jumlah Madrasah
Periode 21 Oktober tahun Tahun 2014 s.d. 2015
1. Perkembangan Jumlah Madrasah

MADRASAH	TAHUN (SISWA)	
	2014	2015
Raudhatul Athfal (RA)	28.627	27.875
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	24.592	24.353
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	16.460	16.741
Madrasah Aliyah (MA)	7.046	7.582

2. Akreditasi Madrasah

Tahun 2014 lebih dari 60% Madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah telah terakreditasi

²⁹Abdurrahman Assegaf, “Menghadapi Liberalisme Pendidikan”, dalam *Mimbar Pembangunan Agama*, No. 178/Rabiul Tsani – Jumadil Awal 1422 H/Juli-1-2001 M/Tahun XV, hlm. 59.

minimal B, sedangkan sisanya masih dalam persiapan dan proses akreditasi. Ditargetkan seluruh madrasah telah seluruhnya diakreditasi pada tahun 2015.³⁰

Administrasi pendidikan pesantren, menurut Zamakhsyari Dhofier, dibedakan ke dalam dua bentuk: *salaf* (klasik) dan *khalaf* (modern). Sebagai lembaga pendidikan Islam, menurut Jusuf Amir Faesal, keberadaan pesantren tetap punya sejumlah kekurangan dan kelebihan.³¹ Kelebihan lembaga pendidikan pesantren adalah keberadaannya yang cenderung dapat diterima sebagai lembaga pendidikan alternatif oleh semua golongan. Kuantitas pesantren juga lebih besar daripada lembaga pendidikan umum karena keberadaan pesantren sejalan dengan struktur penyebaran umat. Adanya tradisi keagamaan dan kepemimpinan yang merupakan potensi nasional untuk pembangunan (keimanan dan ketakwaan) yang menjadi tujuan pendidikan nasional dan terbuka untuk pembaharuan. Pada sisi lain, Perkembangan pesantren juga didukung dengan semakin mengentalnya apresiasi masyarakat Islam Indonesia terhadap pesantren. Pesantren pada mulanya merupakan *rural based-institution* berkembang menjadi lembaga pendidikan urban –elit dan mahal, seperti sejumlah pesantren kota di Jakarta, Bandung, Medan, Pekanbaru, Yogyakarta, Malang, Semarang, Solo, dan Makassar, atau seperti Parung, Jombang, Cilangkap, dan Bekasi. Dari tahun 1970-an, misalnya, bermunculan pesantren seperti Asy-Syafiah, Darul Hikmah, Darur Rahman, Ash-Shiqdiyah di Jakarta; Pesantren Nurul Hikmah, al-kausar, Darul Arafah di Medan, dan Darul Hikmah di Pekan Baru; atau beberapa sekolah umum yang mengadopsi sistem pendidikan pesantren seperti Sekolah Madania dan Dwi Warna di Parang Bogor, serta Madrasah Insan Cendikia di Serpong Tangerang dan Gorontalo.³²

³⁰Kementerian Agama Replubik Indonesia, *Laporan Capaian Kinerja*, hlm. 115-116.

³¹Amir Faesal, *Reorientasi Pendidikan*, hlm. 188-191.

³²Mundzier Suparta, *Perubahan Orientasi*, hlm. 5.

Pendidikan keterampilan yang diberikan kepada para santri untuk membekali mental mereka belajar hidup mandiri dan wiraswasta; keluasan doktrin Islam sehingga menyebabkan semakin menyebarnya pondok pesantren terus tumbuh sebagai lembaga sosial terutama di kalangan kelompok *khalaf* (modern) karena tuntutan menerima perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan zaman: Tingkat berpikir masyarakat juga mengalami kemajuan dan mempengaruhi perkembangan pesantren sebagai lembaga sosial yang cenderung mengangkat harkat manusia.³³ Pengembangan pendidikan melalui kegiatan-kegiatan sosial pesantren meliputi bidang ekonomi, teknologi dan ekologi.³⁴ Dengan demikian, modernisasi dan perubahan orientasi pesantren sangat terkait dengan respons pesantren terhadap perkembangan agama dan tatanan sosial di masyarakat. Perkembangan luar yang mempengaruhi orientasi pesantren itu, antara lain: (1). *Ideologis normatif*, berupa orientasi pesantren itu sendiri dan, ideologis yang diekspresikan dalam norma-norma nasional, seperti Pancasila, yang menuntut sistem pendidikan untuk memperluas dan memperkuat wawasan nasional peserta didik. Karena itu, pesantren yang beredeologi, misalnya Islam, lambat laun harus akan tergeser oleh orientasi ideologis bangsa ini, atau setidaknya akan terjadi krisis identitas ideologis;. (2). *Mobilisasi politik*. Modernisasi dan pembangunan yang digalakkan menuntut sumber daya yang memadai untuk menjadi pemimpin dan inovator. Pendidik diharapkan mampu mencetak kader masa depan yang dapat memimpin bangsa. Karenanya, pesantren dituntut mampu melakukan peran pendidikan seperti ini;. (3). *Mobilisasi ekonomi*. Kemajuan ekonomi meniscayakan adanya sumber daya manusia yang handal dalam bidang ekonomi. Bahkan, perkembangan ekonomi yang semakin kompleks menuntut

keahlian-keahlian spesifik. Peran pendidikan diharapkan mampu mempersiapkan kader.³⁵

Kalau kita melihat dari segi peran maka pesantren sangat mendukung kemerdekaan bangsa dan mengisi kemerdekaan dengan membangun kecerdasan pikiran dan hati, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan pikiran dan hati, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual adalah hal yang sangat membanggakan. Melalui pesantren pendidikan karakter bangsa akan dapat diejawantahkan. Pesantren selama ini telah menjadi garda depan di dalam mendidik masyarakat dan bangsa Indonesia untuk beragama secara benar. Beragama dalam konteks kebangsaan Indonesia.³⁶

Memang tidak ada keraguan lagi tentang peran pesantren di dalam membangun bangsa Indonesia. Islam Indonesia yang ramah dan damai adalah sumbangan terbesar pesantren bagi bangsa Indonesia, dan saya melihat tidak salah jika lahir pemimpin-pemimpin dunia, dan organisasi jika mau mengenal dan belajar Islam yang menyelamatkan dan juga damai tidak lain kecuali di negara tercinta Indonesia.

Kelemahan dan kekurangan pesantren di antaranya adalah ketidakmampuan pesantren mencapai tujuan pendidikannya (mencetak kader ulama yang sekaligus pemimpin umat dan bangsa). Pesantren tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai (fisik, personal dan finansial). Pesantren juga terkesan tradisional, sehingga tidak menjadi pilihan untuk kemajuan. Selain itu, kepemilikan lembaga pesantren oleh keluarga maupun kelompok dan pesantren cenderung eksklusif serta lemahnya visi dan tujuan pesantren dikarenakan penekanan yang terlalu berlebihan terhadap satu aspek disiplin keilmuan tertentu sehingga mengabaikan aspek keilmuan lainnya, terjadi penyempitan orientasi kurikulum dalam lingkungan pendidikan pesantren.

³³Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (T.tp: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), hlm. 41.

³⁴Kuontowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 358.

³⁵Mundzier Suparta, *Perubahan Orientasi*, hlm. 6.

³⁶Nur Syam, *Dari Bilik*,... hlm. 255.

Madrasah adalah salah satu sekolah agama Islam yang dijadikan sebagai tempat proses belajar mengajar secara formal, memiliki kelas-kelas, meja/bangku, kursi dan papan tulis dengan kurikulum yang diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Eksistensi madrasah sudah dikenal sejak abad ke-V. Dalam perkembangannya di Indonesia, madrasah muncul pada awal abad ke-XX. Dengan demikian, lembaga pendidikan ini hadir di tengah-tengah pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, keberadaan madrasah dilatar-belakangi oleh manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam, usaha penyempurnaan sistem pendidikan sebagai upaya menjembatani sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.³⁷

Secara historis, madrasah telah ada di Indonesia pada awal abad 20-an, di antaranya adalah *Madrasah Adabiyah* di Padang tahun 1909, didirikan oleh H. Abdullah Ahmad, *Diniyah School* di Padang pada tahun 1915, didirikan oleh Zainul Din Ngabehi al-Yunusi, *Madrasah Diniyah Putri* di Padang Panjang pada tahun 1923, didirikan oleh Rangkayo Rahman al-Yunusiah.³⁸ Senada pula, Mahmud Yunus mengatakan bahwa madrasah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah *Madrasah Adabiyah* di Padang oleh Syeh Abdullah Ahmad tahun 1909; madrasah ini awalnya bercorak keagamaan tapi kemudian pelajaran umum dimasukkan di dalamnya. Kemudian tahun 1915, sekolah ini menjadi HIS (*Holland Inland School*) yang dalam perkembangannya berubah menjadi *Diniyah School* atau *Madrasah Diniyah*. Landasan hukum bagi keberadaan madrasah pada mulanya tidaklah jelas, tapi kemudian pada tanggal 24 Maret 1975 madrasah memperoleh dasar yuridis dengan lahirnya SKB tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1975, Menteri Agama No. 037/U/1975, dan Menteri P dan K No. 36 tahun 1975 yang

berlaku untuk semua jenjang baik yang dikelola oleh pemerintah (negeri) maupun swasta.³⁹

Ketiga putusan menteri tersebut secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah agar pelajaran umumnya mencapai tingkat yang sama dengan sekolah umum, sehingga ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum. Peningkatan mutu tersebut meliputi kurikulum, buku-buku pelajaran, sarana dan prasarana serta pengajar. Kemudian, dilakukanlah pembedaan fungsional dengan pembagian tugas pembinaan sebagai berikut: pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, dan seterusnya. Dalam rangka efektifitas pendidikan di madrasah, telah dilakukan pula restrukturisasi madrasah melalui Keputusan Menteri Agama No. 15 tahun 1976 untuk Madrasah Ibtidaiyah, No. 16 tahun 1976 untuk Madrasah Tsanawiyah, dan No. 17 tahun 1976 untuk Madrasah Aliyah.

Menyusul SKB tiga menteri, pada tahun 1984 diterbitkan lagi SK Menteri Agama No. 249/V/1984 tentang pembakuan kurikulum sekolah umum dan sekolah madrasah. Kurikulum yang berlaku di madrasah secara nasional didasarkan pada Surat Keputusan No. 371 tahun 1993, yang pada akhirnya melahirkan kurikulum 1984, dengan porsi pendidikan agama 30%, dan kurikulum 1994 dengan porsi pendidikan agama hanya 10% saja.

Di tingkat lembaga pendidikan Islam tinggi, sejarah menunjukkan bahwa lembaga tinggi Islam pertama kali didirikan oleh Mahmud Yunus pada tahun 1940 di Padang,⁴⁰ yang kemudian disusul dengan berdirinya STI (Sekolah Tinggi Islam) di Jakarta pada tahun 1945, yang pada akhirnya pindah ke Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 1948 dengan nama UII (Universitas Islam Indonesia).⁴¹ Lembaga ini kemudian beralih-status menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) berdasarkan PP. No. 34 tahun 1950. Di Jakarta juga didirikan

³⁹M. Arifin, *Kapita Selekta.*, hlm. 230.

⁴⁰Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hlm. 103

⁴¹Hasbullah, *Sejarah Pendidikan.*, hlm. 103-106.

³⁷Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan.*, hlm. 305.

³⁸Abdurrahman Assegaf, *Kontribusi Lembaga.*, hlm. 60.

lembaga serupa bernama Akademi Dienul Islam (ADIA) yang kemudian berubah nama menjadi IAIN pada tahun 1960.

Eksistensi IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya bertujuan bagi pengembangan bidang ilmu agama sehingga tugas pokok IAIN adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran setingkat perguruan tingkat menengah berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan secara ilmiah memberikan pendidikan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama. Kedudukan IAIN secara konstitusional semakin kokoh dan secara fungsional berperan sebagai subsistem dari pendidikan tinggi nasional untuk mengkaji, mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan agama dalam lingkup budaya akademik dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.⁴²

Untuk menjaga profesionalitasnya dan kemampuan akademik para guru, maka lembaga pendidikan tinggi, khususnya UIN, IAIN, dan STAIN Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentu memiliki peluang dan tanggung jawab yang sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu maka ada 2 hal yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan ini, yaitu:

Pertama, lembaga pendidikan tinggi harus menjadi *Center of Academic Recharging (CAR)*. Di dalam konteks ini, maka seharusnya PTAIN, khususnya Fakultas Tarbiyah atau Jurusan Tarbiyah, mestinya dapat menjadi lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan secara terus menerus terhadap kemampuan akademik para guru. Para guru tidak bisa dibiarkan berkembang apa adanya, akan tetapi harus secara terus menerus atau berkala dibina agar kekuatan kompetensi akademiknya tidak berkurang. Para guru dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, makanya satu hak yang tidak bisa diabaikan adalah merawat dan mengembangkan kompetensi akademiknya tersebut.

Kedua, lembaga pendidikan tinggi sebagai *Center of Profesional Recharging (CPR)*. Guru harus terus menerus menjaga kualitas profesionalismenya. Guru tidak boleh hanya mendasarkan kemampuannya pada apa yang sudah didapatnya. Sebagai guru profesional, maka kemampuan atau kompetensi profesional dan lainnya harus terus dijaga. Sebagai kunci keberhasilan pendidikan, maka guru harus terus menjaga kompetensinya agar perbaikan kualitas pendidikan dapat diraih di masa depan. Oleh karena itu, harus ada sebuah institusi yang bertugas untuk membangun dan mengembangkan kompetensinya tersebut di masa sekarang dan di masa akan datang. Oleh sebab itulah Maka, Fakultas Tarbiyah atau Jurusan Tarbiyah harus mengemngembangkan dan memanggul tugas yang sangat mulia ini.⁴³

Melalui program yang terkait dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan para pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus optimis bahwa pendidikan Indonesia ke depan akan lebih baik adanya. Pendidikan di Indonesia harus *one step ahead*. Dan itu sangat tergantung kepada bagaimana kita mengelola para guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan.⁴⁴ Menilik fenomena dan realitas sosial yang ada, Muslim harus melakukan tindakan kongkrit dalam merumuskan perencanaan dan kebijakan karena *modus operandi* sains modern tidak terlepas dari bentuk serta kualitas sistem pendidikan yang mampu mendukung pengembangan IPTEK.⁴⁵

Kesimpulan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, secara umum terdapat berbagai jenis lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Penulis dalam hal ini sependapat dengan Jusuf Amir Faesal bahwa penganekaragaman lembaga pendidikan Islam dengan tujuan yang jelas

⁴²Tobroni, "Eksistensi IAIN dan Perguruan Tinggi Islam", Makalah disampaikan dalam Dies Natalis UMM, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1993), hlm. 51.

⁴³Nur Syam, *Dari Bbilik*,..., hlm. 227.

⁴⁴Nur Syam, *Dari Bilik*, hlm. 227. Ibid

⁴⁵Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 250.

dan terarah pada adanya deferensiasi profesi merupakan cara yang baik, efektif dan efisien. Namun penganekaragaman (diversifikasi) semu dan nuansa tujuan atau suatu proses diversifikasi melalui bentuk lainnya saja akan berdampak pada duplikasi, penghamburan dan ketidakefektifan. Penulis berpendapat bahwa yang layak disebut lembaga pendidikan Islam adalah pesantren (sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal) dan madrasah (sebagai lembaga pendidikan formal).

Dikotomi lembaga pendidikan Islam dan umum sebagai bagian dari pendidikan nasional seharusnya tidak perlu terjadi. Islamisasi pengetahuan tidak selamanya benar dan menguntungkan, sebagaimana telah dilakukan oleh para tokoh pendidikan seperti Ismail Raji al-Faruqi, Naquib al-Attas, Hasan Bilgrami, Ziaudin Sardar yang akhirnya malah banyak ditentang oleh kalangan, seperti di antaranya M. Arqoun, seorang guru besar *Islamic Studies* pada Universitas Sorbone Prancis. Ia mengatakan bahwa kesalahan besar bila ada keinginan dari para cendekiawan Muslim untuk melakukan islamisasi ilmu dan teknologi, sebab hal ini dapat menjebak kita pada pendekatan yang menganggap Islam hanya semata-mata sebagai ideologi.⁴⁶

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Faesal, Jusuf, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insan Pers, 1995.
- Arifin, M, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Assegaf, Abdurrahman, *Kontribusi Lembaga Pendidikan Islam Abad XX Bagi Intelektual Islam di Indonesia*, Surabaya: KANWIL DEPAG, 1995.
- "Menghadapi Liberalisme Pendidikan", dalam *Mimbar Pembangunan Agama*, No. 178/Rabiul Tsani - Jumadil Awal 1422 H/ Juli-1-2001 M/Tahun XV
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- DEPLEMHANNAS dan UNMER, *Rumusan Hasil Seminar Nasional Pemantapan Sistem Pendidikan Nasional*, Malang: UNMER Pers, 1990.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Suatu Paradigma Hidup Kiyai*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Hadi, Abdul, *Sikap dan Tradisi Keilmuan Pesantren Dalam Religius IPTEK: Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Hasan, Chalijah, *Kajian Perbandingan Pendidikan*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia "Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1991.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, Bandung: Tri Genda Karya, 1993.

⁴⁶Muslih Usa, *Pendidikan Islam*, hlm. 5.

- Munir Mulkhan, Abdul, *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Yogyakarta: Sipress, 1994.
- Rahardjo, Dawam (ed.), *Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia Abad XXI*, Jakarta: PT. Inter Masa, 1997.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sztompka, Piotr, *The Sociology of Social Change*, terj. Ali Mandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2004.
- Tadjab, *Perbandingan Pendidikan*, Surabaya: Karya Abdi Tama, 1994.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Tobroni, "Eksistensi IAIN dan Perguruan Tinggi Islam", Makalah disampaikan dalam Dies Natalis UMM, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1993.
- Toha, M. Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Gema Insan Pers, 1996.
- Usa, Muslih, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1996.

PANDUAN PENULISAN JURNAL EMPIRISMA

1. Naskah ditulis dengan menggunakan ukuran kertas A4, margin 4-4-3-3, *Time New Roman* (12 font size), Spasi 1,2, dan panjang naskah antara 15-20 hlm.

2. Naskah ditulis dengan mengikuti sistematika berikut:

Judul

- Lugas dan informatif;
- Kapital tebal (*capital, bold*)

Nama Penulis, Institusi, dan Alamat Email

- Ditulis di bawah judul
- Nama lengkap tanpa gelar;
- Menggunakan kata DAN jika penulis lebih dari satu;
- Institusi penulis
- Alamat email yang masih aktif

Abstrak

- Ditulis dalam Bahasa Inggris bila naskah dalam bahasa Indonesia; ditulis dalam bahasa Indonesia bila naskah dalam bahasa asing.
- Panjang abstrak 250-300 kata;
- Mencantumkan sedikitnya 3 sd. 5 kata kunci

Pendahuluan (Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian)

Pembahasan (Berisi sub-bab yang membahas temuan dan analisis hasil penelitian)

Kesimpulan

Daftar Pustaka

3. Naskah mencantumkan rujukan dengan menggunakan sistem catatan kaki (*footnote*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rujukan ditulis lengkap **tanpa** menggunakan *ibid.*, *op.cit.*, dan *loc. it*;
- Sumber yang dirujuk pertama kali ditulis secara lengkap dengan mencantumkan: Nama Penulis, *Judul Buku*, (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), halaman (hlm.)
- Rujukan selanjutnya untuk sumber yang sama ditulis dengan mencantumkan nama terakhir penulis, dua atau tiga kata dari judul buku, dan halaman.

Contoh Penulisan Catatan Kaki:

¹Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 243.

²Greg Fealy, "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia" dalam Greg Fealy dan Selly White (eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politic in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2007), hlm. 16.

³Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 15.

4. Naskah mencantumkan daftar pustaka dengan pola penulisan sama seperti catatan kaki dengan menghilangkan keterangan halaman dan tanda kurung pada data publikasi. Daftar pustaka disusun menurut abjad dan mendahulukan nama belakang pengarang ("al" pada nama pengarang Arab dianggap tidak ada).

Contoh Penulisan Daftar Pustaka:

Daftar Pustaka

Fealy, Greg, "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia" dalam Greg Fealy dan Selly White (eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politic in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2007.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

5. Istilah bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan gaya transliterasi Litbang of Conggres (LC).

Contoh:

¹Muṣṭhafā al-Sibā'ī, *al-Istishrāq wa al-Mustashriqūn; Ma Lahum wa Mā 'alayhim*, Cet I, (Riyadh: Dār Al-Warrāq, 1999), hlm. 18.

6. Penulis berhak mendapatkan *hard-copy* sebanyak 3 (tiga) ekslembar.

ISSN 1829-9563



9 771829 956007